KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

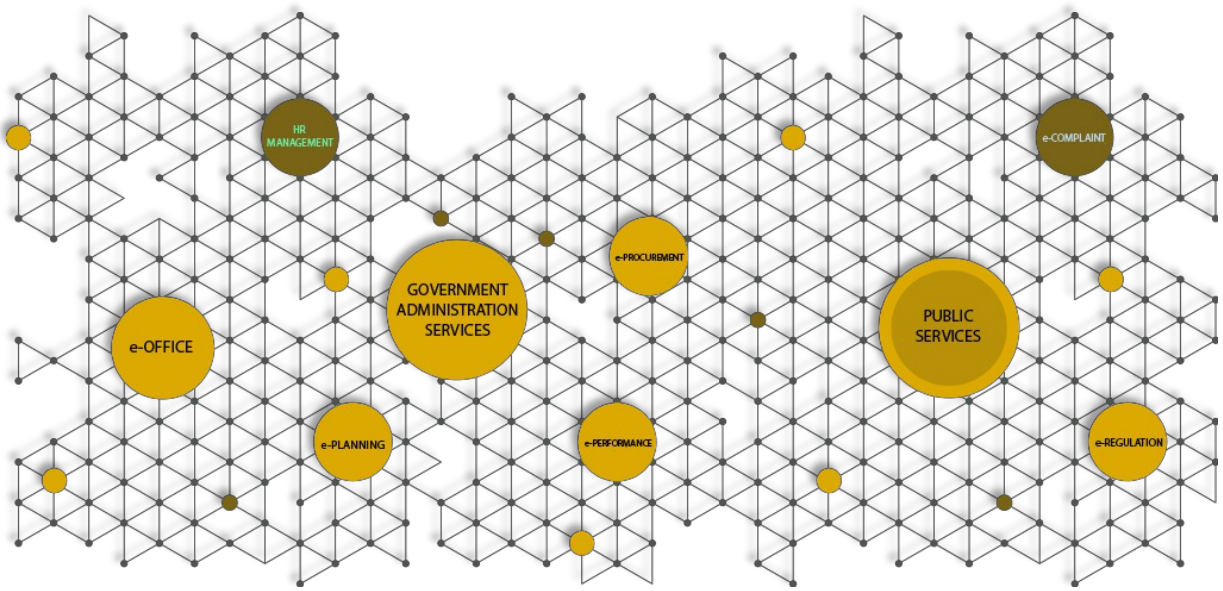

INDEKS SPBE

PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2020 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara, dan instansi pemerintah.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Tim Evaluator Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 20 Januari 2021

Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,

Rini Widyantini

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2020

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Peraturan Menteri Pemberdayaaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode Tingkat Kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

1. Rintisan	• Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara *ad-hoc*.
2. Terkelola	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.
3. Terstandar-disasi	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi.
4. Terintegrasi dan Terukur	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.
5. Optimum	• Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

1. Informasi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.
2. Interaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
3. Transaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
4. Kolaborasi	• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.
5. Optimalisasi	• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	**17%**
Aspek 1 - Kebijakan Tata Kelola SPBE	7%
Aspek 2 - Kebijakan Layanan SPBE	10%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	**28%**
Aspek 3 - Kelembagaan	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	12%
Domain 3 - Layanan SPBE	**55%**
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	33%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	22%

Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2.26	3.19	3.14	2.37	2.56	2.04	2.43
Domain Kebijakan	2.07	2.94	2.92	2.14	2.94	1.86	2.18
Kebijakan Tata Kelola	2.01	2.75	2.99	2.15	2.42	1.79	2.18
Kebijakan Layanan	2.11	3.07	2.87	2.13	2.50	1.91	2.18
Domain Tata Kelola	1.95	2.87	2.97	2.32	2.87	1.70	2.08
Kelembagaan	1.88	2.90	2.93	2.28	2.04	1.64	2.02
Strategi & Perencanaan	1.97	2.66	2.98	2.25	2.44	1.74	2.10
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.98	2.99	3.00	2.40	2.29	1.72	2.12
Domain Layanan SPBE	2.48	3.43	3.29	2.47	3.43	2.26	2.69
Administrasi Pemerintahan	2.62	3.52	3.40	2.62	2.82	2.42	2.80
Layanan Publik	2.23	3.28	3.09	2.20	2.58	1.98	2.49

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU

2,60
(Baik)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

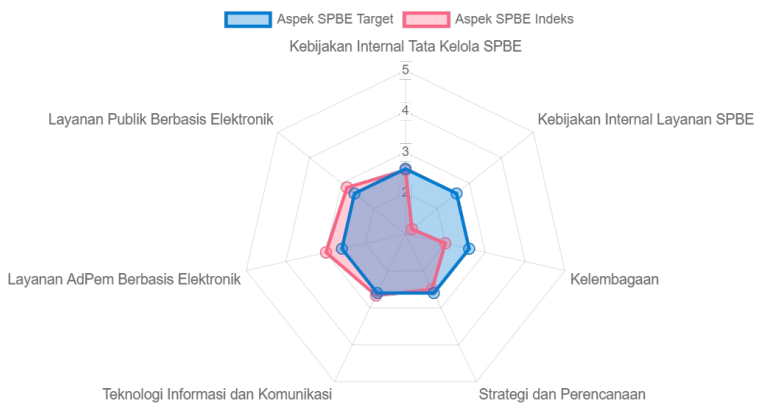

Nama Indeks	Nilai
SPBE	2,60
Domain Kebijakan Internal SPBE	1,76
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,57
Kebijakan Internal Layanan SPBE	1,20
Domain Tata Kelola SPBE	2,43
Kelembagaan	2,00
Strategi dan Perencanaan	2,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,67
Domain Layanan SPBE	2,94
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83

Kekuatan dan Kelemahan

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan adanya Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE, Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE, Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data, dan Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi yang seluruhnya telah terstandarisasi. Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi, Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK, dan Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai masih pada tingkat terkelola.

- Kekuatan
  Belum terdapat kekuatan.
- Kelemahan
  Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kebijakan internal yang hanya mendukung pengaturan pada sebagian kebutuhan di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu untuk Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi, Anggaran dan Belanja TIK, dan Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai.

B. Kebijakan Internal Layanan SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Layanan SPBE yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan adanya Kebijakan Internal Layanan Pengadaan yang terstandarisasi.

- Kekuatan
  Belum terdapat kekuatan.
- Kelemahan
  Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur Layanan Naskah Dinas, Layanan Manajemen Kepegawaian, Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Manajemen Kinerja, Layanan Pengaduan Publik, Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Layanan Whistle-blowing system, dan Layanan

Publik dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan yang disampaikan.

C. Kelembagaan

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kelembagaan yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah adanya tata kelola untuk Tim Pengarah SPBE yang berada pada tingkat terkelola.

- Kekuatan
  Belum terdapat kekuatan.
- Kelemahan
  Dalam penerapan Aspek Kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tata kelola untuk Tim Pengarah SPBE yang masih untuk sebagian tugas dan fungsinya. Tata kelola untuk Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi masih bersifat ad-hoc.

D. Strategi dan Perencanaan

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Strategi dan Perencanaan yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah adanya Rencana Induk SPBE yang telah terstandarisasi. Tata kelola Anggaran Belanja dan TIK masih pada tingkat terkelola.

- Kekuatan
  Belum terdapat kekuatan.
- Kelemahan
  Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tata kelola Anggaran Belanja dan TIK yang baru memenuhi sebagian dari kebutuhan saja.

E. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah adanya tata kelola Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai yang terintegrasi dan terukur. Tata kelola Pengoperasian Pusat Data, dan Integrasi Sistem Aplikasi masih pada tingkat terkelola.

- Kekuatan
  Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tata kelola Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai yang tercantum dalam Dokumen Perencanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu 2020-2024.
- Kelemahan
  Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tata kelola Pengoperasian Pusat Data yang baru sebagian dimanfaatkan; dan Integrasi Sistem Aplikasi yang hanya dibuktikan oleh screenshot.

F. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menerapkan Layanan Manajemen Kepegawaian, Layanan Manajemen Perencanaan, Layanan Manajemen Penganggaran, Layanan Manajemen Keuangan, dan Layanan Manajemen Kinerja pada tingkat trensaksi. Layanan Pengadaan telah mencapai tingkat kolaborasi.

- Kekuatan
  Pada Aspek Layanan Administrasi Berbasis Elektronik ini dapat terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Layanan Pengadaan dengan menggunakan SPSE yang terintegrasi dengan SPBE Pusat.
- Kelemahan
  Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum memiliki Layanan Naskah Dinas, karena masih menggunakan email saja.

G. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menerapkan Layanan Publik SIMBAJA. LAYANAN PENGADUAN PUBLIK, dan Layanan Publik Aplikasi Statistik Sektoral telah mencapai tingkat kolaborasi. Layanan JDIH berada pada tingkat interaksi.

- Kekuatan
  Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki LAYANAN PENGADUAN PUBLIK yang menjadi kekuatan berdasarkan hasil konsensus

harmonisasi/normalisasi dan sesuai Kepmenpanrb No 680/2020 tentang Penetapan Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, bahwa pada proses bisnisnya pemanfaatan data SP4N Lapor! telah terintegrasi; kekuatan lain adalah Layanan Publik Aplikasi Statistik Sektoral yang terhubung dengan aplikasi Dukcapil.

- Kelemahan
  Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum memiliki Layanan Whistle-blowing system dan satu Layanan Publik lagi, sedangkan fungsi pada proses bisnis Sistem JDIH Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bukanlah Proses Bisnis JDIH melainkan Proses Bisnis Content Management System dan JDIH merupakan media diseminasi peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sudah dapat memperlihatkan predikat CUKUP dimana dari gambaran pelaksanaan SPBE internal ada aspek-aspek SPBE yang telah diterapkan memenuhi standar, selain terdapat beberapa kelemahan. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih memiliki kelemahan pada Aspek Kebijakan Internal Layanan SPBE dan Aspek Kelembagaan. Kebijakan Internal Layanan Pengadaan sudah ada, walaupun masih tingkat pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem pengadaan secara elektronik di Pemerintah Daerah, belum mencapai kolaborasi / integrasi. Sedangkan yang belum ada adalah kebijakan internal yang mengatur Layanan Naskah Dinas, Layanan Manajemen Kepegawaian, Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Manajemen Kinerja, Layanan Pengaduan Publik, Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Layanan Whistle-blowing system, dan Layanan Publik. Kebijakan-kebijakan ini harus dibuat sebagai dasar hukum penggunaan/penyediaan layanan-layanan tersebut. Dalam penerapan Aspek Kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tata kelola untuk Tim Pengarah SPBE yang masih untuk sebagian tugas dan fungsinya. Tata kelola untuk Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi masih bersifat ad-hoc. Tata kelola Tim Pengarah SPBE sebaiknya berisi daftar jabatan, tugas pokok dan fungsi yang jelas, sehingga bisa menjadi acuan walaupun ada pergantian personil. Secara keseluruhan, masih banyak yang harus dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, karena predikat SPBE yang diperoleh masih dalam kisaran CUKUP. Pembenahan dapat dimulai dengan melihat kebijakan dan tata kelola yang sudah ada. Jika sudah ada kebijakan, dapat ditindaklanjuti dengan tata kelola, ataupun sebaiknya. Demikian juga dalam hubungannya dengan layanan. Jika layanan sudah ada, tetapi dokumen kebijakan dan/atau tata kelola belum ada, maka dapat dilengkapi dengan dokumen-dokumen tersebut. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE dan aspek penerapan SPBE lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian yang diminta.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	3
2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	2
3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	3
4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	2
5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	3
6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	3
7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	2
8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	1
9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	1
10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaaan dan Penganggaran	1
11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	1
12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	1
13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	3
14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	1
15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	1
16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System	1
17	Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah	1
18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	2
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	2
20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	3
21	Anggaran dan Belanja TIK	2
22	Pengoperasian Pusat Data	2
23	Integrasi Sistem Aplikasi	2
24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	4
25	Layanan Naskah Dinas	2
26	Layanan Manajemen Kepegawaian	3
27	Layanan Manajemen Perencanaan	3
28	Layanan Manajemen Penganggaran	3
29	Layanan Manajemen Keuangan	3
30	Layanan Manajemen Kinerja	3
31	Layanan Pengadaan	4
32	Layanan Pengaduan Publik	4
33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	2
34	Layanan Whistle-Blowing System	1
35	Layanan Publik Instansi Pemerintah 1	3
36	Layanan Publik Instansi Pemerintah 2	3
37	Layanan Publik Instansi Pemerintah 3	4